

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dapat diselesaikan. Penyusunan Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dalam rangka untuk memberikan informasi ketersediaan SDM Kesehatan di Wilayah Kerja Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan jenis tenaga dan jenis fasilitas kesehatan yang tersedia. Dari informasi data tersebut dapat dipotret ketersediaan SDM kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wilayah kerja Kepulauan Riau.

Dengan terbitnya Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ini diharapkan dapat memberi gambaran fungsi subsistem SDM kesehatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan serta dapat memberikan manfaat bagi jajaran Dinas Kesehatan khususnya, berbagai pihak/sector terkait dan masyarakat pada umumnya.

Kami menyadari bahwa penulisan dokumen ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan dokumen ini.

Tanjungpinang, Desember 2020

MOH. BISRI, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197101091995011009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	5
1.2.1 Tujuan Umum.....	5
1.2.2 Tujuan Khusus	5
1.3 Sistematika Penulisan	6
BAB 2 GAMBARAN ORGANISASI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	8
2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	8
2.2 Bidang Sumber Daya Kesehatan.....	9
BAB3 DESKRIPSI PERENCANAAN SDM KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.....	14
3.1 Rekapitulasi SDMK Provinsi Kepulauan Riau	15
3.2 Puskesmas.....	33
3.3 Rumah Sakit.....	37
3.4 Fasilitas Kesehatan Lainnya	40
BAB 4 DESKRIPSI PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	42
BAB 5 DESKRIPSI PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN.....	46
BAB 6 DESKRIPSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MUTU.....	55
BAB 7 PENUTUP	60
7.1 Kesimpulan	60
7.2 Saran.....	61
BAB 8 DAFTAR REFERENSI.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Distribusi Personel Pengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	12
Tabel 3.1	Rekapitulasi Data SDM Kesehatan Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau Tahun 2020	17
Tabel 3.2	Tipe Fasyankes yang Tercakup pada Pemetaan SDM Kesehatan Tahun 2020.....	18
Tabel 3.3	Rekapitulasi SDM Kesehatan di Fasyankes Berdasarkan Fungsi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	20
Tabel 3.4	Rekapitulasi SDM Kesehatan Di Fasyankes Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi) Tahun 2020.....	21
Tabel 3.5	Rekapitulasi Tenaga Medis di Fasyankes Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Fungsi (Kode SDMK) Tahun 2020	22
Tabel 3.6	Rekapitulasi Tenaga Medis Spesialis Di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDMK) Tahun 2020	23
Tabel 3.7	Rekapitulasi Tenaga Keperawatan di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDMK) Tahun 2020	24
Tabel 3.8	Rekapitulasi Tenaga Keperawatan di Fasyankes Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi) Tahun 2020	24
Tabel 3.9	Rekapitulasi Tenaga Farmasi di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDMK) Tahun 2020	25
Tabel 3.10	Rekapitulasi Tenaga Kefarmasian di Fasyankes Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi) Tahun 2020	25
Tabel 3.11	Rekapitulasi Tenaga Kesling dan Gizi di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDMK) Tahun 2020	26
Tabel 3.12	Rekapitulasi Tenaga Kesling di Fasyankes Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi) Tahun 2020.....	26

Tabel 3.13	Rekapitulasi Tenaga Kesmas Di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDMK) Tahun 2020	27
Tabel 3.14	Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Masyarakat di Fasyankes Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi) Tahun 2020	27
Tabel 3.15	Rekapitulasi Tenaga Keterampilan Fisik di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDMK) Tahun 2020	28
Tabel 3.16	Rekapitulasi Tenaga Keterampilan Fisik di Fasyankes Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi) Tahun 2020	28
Tabel 3.17	Rekapitulasi Tenaga Keteknisian Medis di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDMK) Tahun 2020	29
Tabel 3.18	Rekapitulasi Tenaga Keteknisian Medis di Fasyankes Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi) Tahun 2020	29
Tabel 3.19	Rekapitulasi Tenaga Teknik Biomedika di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDMK) Tahun 2020	30
Tabel 3.20	Rekapitulasi Tenaga Teknik Biomedika di Fasyankes Berdasarkan Jenjang Pendidikan (kode prodi) Tahun 2020	30
Tabel 3.21	Rekapitulasi Asisten Tenaga Kesehatan di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDMK) Tahun 2020	31
Tabel 3.22	Rekapitulasi Tenaga Asisten Nakes di Fasyankes Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi) Tahun 2020	31
Tabel 3.23	Rekapitulasi Tenaga Penunjang Kesehatan di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDMK) Tahun 2020	32
Tabel 3.24	Rekapitulasi Tenaga Penunjang di Fasyankes Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi) Tahun 2020.....	32
Tabel 3.25	Daftar Puskesmas se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	33

Tabel 3.26	Puskesmas yang Memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan Strategis di Kabupate/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	36
Tabel 3.27	Jumlah Rumah Sakit Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	39
Tabel 3.28	Ketersediaan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Tipe C dan D di Provinsi Kepulauan Riau	39
Tabel 3.29	Jumlah SDM di Fasilitas Kesehatan Lainnya di Provinsi Kepulauan Riau yang Terdata di SI SDM	40
Tabel 4.1	Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Non PNS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	42
Tabel 4.2	Rekapitulasi SDM Kesehatan yang Mengikuti Diklat Berdasarkan Rumpun Diklat di Provinsi Kepulauan Riau Sampai Dengan Tahun 2020	45
Tabel 5.1	Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2019	47
Tabel 5.2	Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2020	48
Tabel 5.3	Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2020	48
Tabel 5.4	Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2020	49
Tabel 5.5	Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2020	49
Tabel 5.6	Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2020	50
Tabel 5.7	Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2020	50
Tabel 5.8	Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2020	51
Tabel 5.9	Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2020	51

Tabel 5.10	Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2020	52
Tabel 5.11	Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2020	53
Tabel 5.12	Rekapitulasi PGDS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	54
Tabel 6.1	Rekapitulasi Jumlah Tenaga Kesehatan yang Memiliki Izin dan Registrasi Tenaga Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 2020.....	9
Gambar 4.1	Rekapitulasi SDM Kesehatan yang Melanjutkan Pendidikan Berdasarkan Jenis Dikjut dan Jenjang Pendidikan Tahun 2020.....	44

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan, pelatihan dan pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi – tingginya. Dalam rangka memperoleh gambaran yang paripurna terkait SDMK tersebut, diperlukan adanya sistem informasi SDMK dan outputnya berupa Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan.

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 tanggal 24 September 2002 dan merupakan provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau terletak pada posisi yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja.

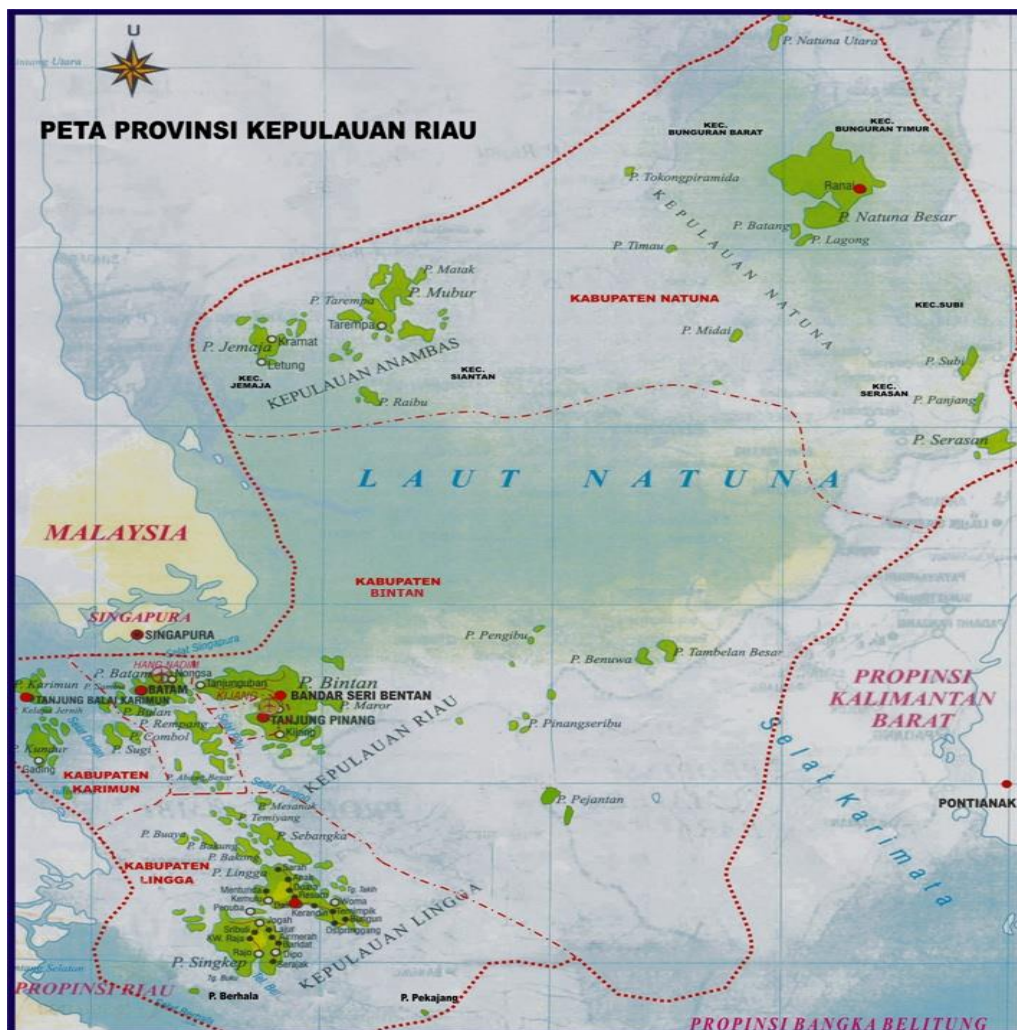
Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari lautan dan pulau – pulau yang tersebar dari Selat Malaka sampai Laut Natuna. Luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau 252.601 km² dimana sekitar 96% berupa lautan dan 4% berupa daratan. Secara geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau terletak pada 00°29' LU - 04°40' LU serta antara 103°22' BT - 109°04' BT, yang merupakan daerah kepulauan terdiri atas pulau besar dan kecil berjumlah kurang lebih 2.408 pulau, dimana sekitar 30% belum bernama dan belum ada penduduk (1).

Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, yaitu 1) Kabupaten Bintan ibu kota Bintan Bunyu; 2) Kabupaten Karimun dengan ibu kota Tanjung Balai Karimun; 3) Kabupaten Natuna dengan ibu kota

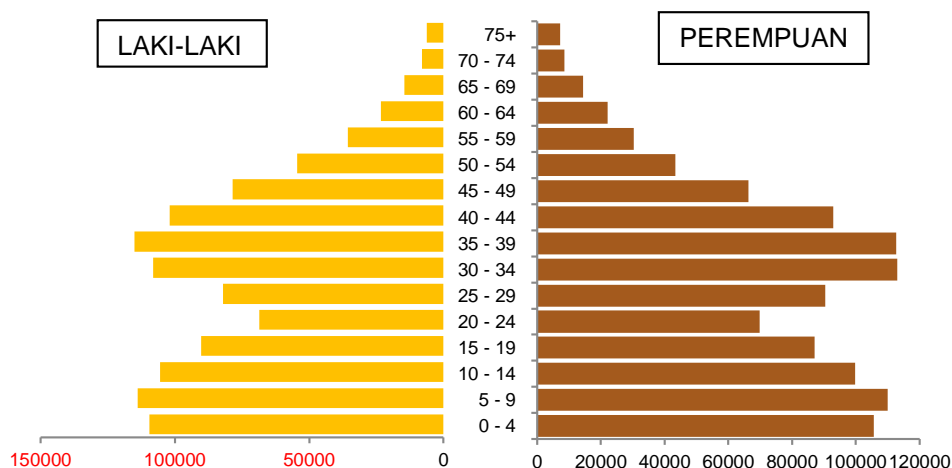
Ranai; 4) Kabupaten Lingga dengan ibu kota Daik; 5) Kota Tanjungpinang dengan ibu kota Tanjungpinang; 6) Kota Batam dengan ibu kota Batam, dan 7) Kabupaten Kepulauan Anambas dengan ibu kota Tarempa, dimana Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008.

Motto Provinsi Kepulauan Riau “Berpancang Amanah, Bersauh Marwah” yang berarti tekad untuk membangun daerahnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas dan berakhlak mulia. Berikut peta wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau



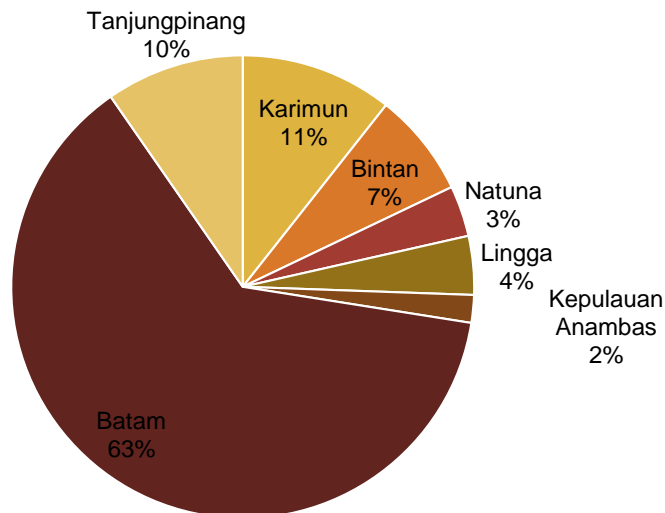
Jumlah penduduk Kepulauan Riau tahun 2019 menurut Kabupaten/Kota tercatat sebanyak 2.189.653 dengan penduduk laki-laki 1.115.765 jiwa (50,96%) dan perempuan 1.073.888 jiwa (49,04%). Rasio jenis kelamin sebesar 104 yang artinya setiap 100 jiwa perempuan, terdapat 104 jiwa laki-laki. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena beberapa kota di Kepulauan Riau termasuk daerah Industri, sehingga pekerja laki-laki banyak yang bermigrasi ke Kepulauan Riau. Dominasi penduduk pekerja tersebut juga tergambar dari piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan gambaran komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Piramida penduduk dapat digunakan pemerintah dalam membuat dan menentukan kebijakan untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Berikut ini piramida penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019.



Gambar 1.2 Piramida Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Dari gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak adalah penduduk di usia 30 - 39 tahun, dan terkecil adalah di usia 75 tahun ke atas. Dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak laki-laki dan perempuan adalah penduduk pada usia produktif bekerja. Peranan penduduk dalam pembangunan akan berhasil apabila memiliki kemampuan dalam menjawab semua tantangan dalam pembangunan baik posisinya sebagai pengelola sumber daya alam maupun sebagai pengguna/konsumen sumber daya alam.

Secara geografis, penduduk Provinsi Kepulauan Riau tersebar di beberapa pulau besar dan pulau-pulau atau kepulauan. Pola persebaran penduduk mengikuti wilayah-wilayah yang berdekatan dengan sumber lapangan pekerjaan seperti daerah industri, perkantoran dan perdagangan.



Gambar 1.3 Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Se - Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Dari gambar 1.3 dapat dilihat bahwa persebaran penduduk Kepulauan Riau dari yang paling besar ke kecil berturut-turut sebagai berikut Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan yang paling kecil adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pertumbuhan jumlah penduduk kelihatannya meningkat setiap tahunnya, dan hal ini menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara memadai dan terdistribusi secara baik. Tentunya dalam menunjang pelayanan kesehatan, jumlah SDM kesehatan yang tersedia di fasilitas pelayanan juga wajib tersedia sesuai kebutuhan.

Saat ini, sebaran SDM Kesehatan tidak merata diberbagai fasilitas pelayanan kesehatan, padahal jumlah SDM Kesehatan sudah cukup

banyak. Pemerintah Pusat dan Daerah berperan penting dalam alur perencanaan kebutuhan, pengadaan dan distribusi SDM Kesehatan. Diharapkan tingkat pusat dan daerah mampu melakukan pengelolaan SDM Kesehatan. Dalam melakukan pengelolaan tersebut, dibutuhkan informasi yang terbarukan dari setiap institusi dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan gambaran tentang pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang diolah melalui pemetaan data SDM Kesehatan dari tingkat fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kabupaten/Kota hingga tingkat Provinsi. Dalam penyusunannya, setiap pengelola data SDM Kesehatan baik tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi melakukan pengumpulan dan pemutakhiran data SDM Kesehatan dan dianalisis menjadi informasi SDM Kesehatan.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Penyusunan Dokumen Deskripsi Data SDM Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi sumber daya manusia kesehatan yang lengkap, *valid*, *update*, dan terkini di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, unit kerja, dan institusi kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, serta sebagai bahan acuan dalam distribusi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan data SDM kesehatan.

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Tersedianya deskripsi perencanaan SDM Kesehatan
- b. Tersedianya deskripsi pengadaan SDM Kesehatan
- c. Tersedianya deskripsi pendayagunaan SDM Kesehatan
- d. Tersedianya deskripsi pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan ini terdiri dari:

Bab 1 : Pendahuluan

Bab 2 : Gambaran Organisasi dan Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi

Bab 3 : Deskripsi Perencanaan SDM Kesehatan

Bagian ini menggambarkan kondisi terkini keadaan SDM kesehatan yang ada wilayah provinsi, termasuk kondisi kekurangan dan kelebihan SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun non pemerintah. *(ditambahkan tabel rekap dari SI SDMK)*

Bab 4 : Deskripsi Pengadaan SDM Kesehatan

Menggambarkan upaya-upaya pengadaan SDM Kesehatan yang dilaksanakan di wilayah provinsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan. Pengadaan tenaga kesehatan dapat dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.

(ditambahkan tabel rekap dari SI SDMK)

Bab 5 : Deskripsi Pendayagunaan SDM Kesehatan

Menggambarkan upaya-upaya pendayagunaan SDM Kesehatan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan termasuk diantaranya pendayagunaan pegawai tidak tetap, kontrak, penugasan khusus dan sebagainya.

(ditambahkan tabel data pendukung)

Bab 6 : Deskripsi Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDM Kesehatan

Menggambarkan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan yang dilaksanakan, meliputi upaya standarisasi, dan sertifikasi terhadap SDM Kesehatan termasuk registrasi dan perizinan praktik terhadap tenaga kesehatan.

(ditambahkan tabel rekapitan dari SI SDMK)

Bab 7 : Penutup

Kedepannya, pemetaan akan dilakukan dengan menyisir keberadaan tenaga kesehatan yang bekerja di Fasyankes Swasta. Diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan fasyankes swasta yang ada di wilayah kerjanya sehingga didapatkan data keberadaan SDM Kesehatan yang lebih valid dan *update*.

BAB 2

GAMBARAN ORGANISASI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

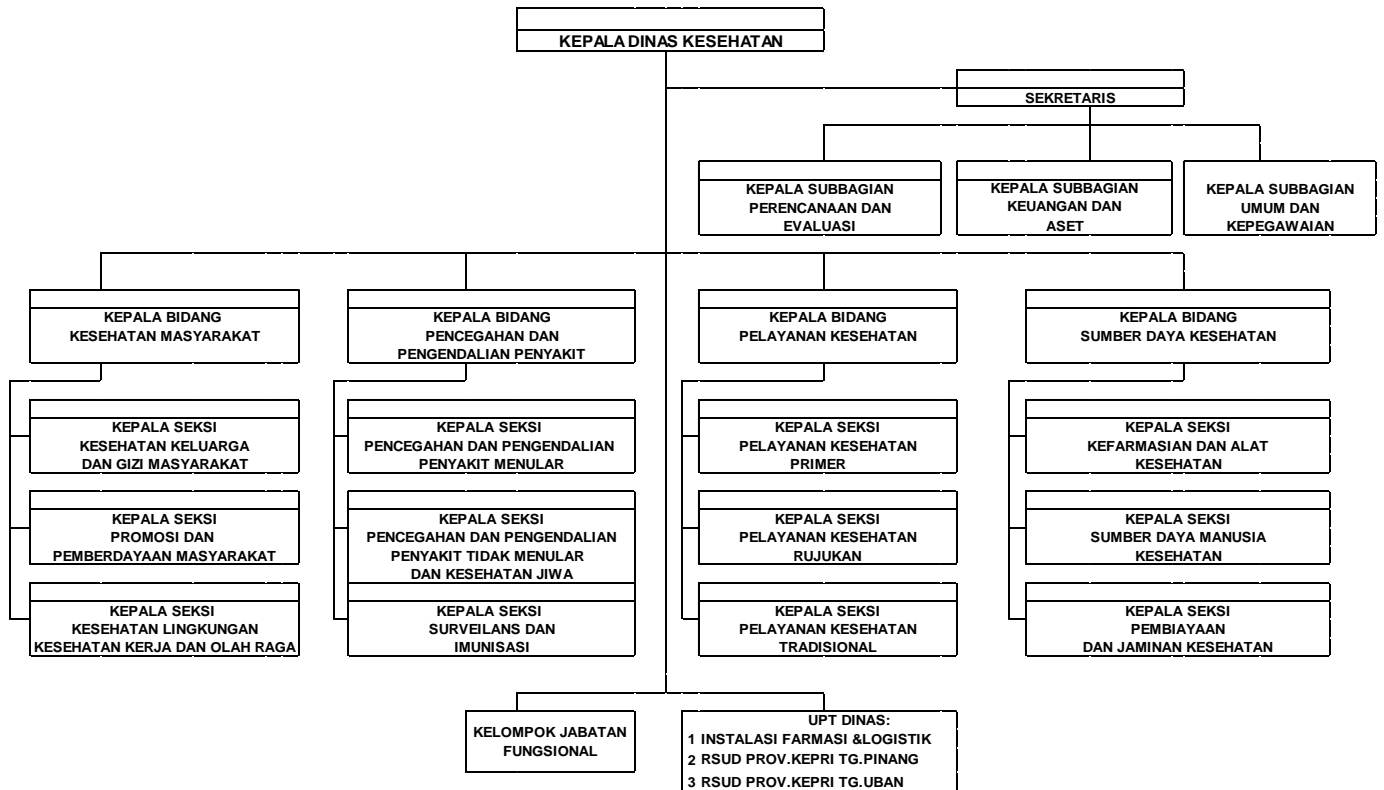
2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi (3).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi perizinan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kesehatan yang diberikan oleh Gubernur.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 2020



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 bidang dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat;
2. Bidang Kesehatan Masyarakat;
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Bidang Pelayanan Kesehatan;
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan.

2.2 Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan adalah salah satu dari 4 Bidang yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari 3 seksi, yaitu :

- 1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 2) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Adapun fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan antara lain:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang sumber daya kesehatan;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sumber daya kesehatan;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sumber daya kesehatan;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang sumber daya kesehatan;
- 5) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, perizinan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait kefarmasian dan alat kesehatan;
- 6) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait sumber daya manusia kesehatan;
- 7) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang sumber daya kesehatan ;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya kesehatan;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepada Dinas.

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang disingkat SDM Kesehatan merupakan Seksi yang mengelola tugas-tugas yang terkait dengan SDM Kesehatan. Adapun uraian tugas seksi SDM Kesehatan adalah:

- 1) Merencanakan kegiatan seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

- 2) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi kegiatan sumber daya manusia kesehatan
- 3) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- 4) Menyelenggarakan kesekretariatan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) dalam fasilitasi penerbitan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan;
- 5) Menyusun kebutuhan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dengan melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- 6) Melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis dan pengawasan sarana pendidikan kesehatan;
- 7) Melaksanakan pemilihan tenaga kesehatan teladan di puskesmas tingkat provinsi;
- 8) Melaksanakan kesekretariatan Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI);
- 9) Melaksanakan fasilitasi pengusulan SDM Kesehatan peserta program beasiswa tugas belajar, Program Pendidikan Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis (PPDS – PPDGS);
- 10) Melaksanakan pengelolaan administrasi tenaga kesehatan Program Nusantara Sehat;
- 11) Melaksanakan pengelolaan administrasi Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS);
- 12) Melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis dalam pembinaan jabatan fungsional kesehatan;
- 13) Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor secara terpadu dan komprehensif guna optimalisasi keberlangsungan program sumber daya manusia kesehatan sesuai kewenangannya;
- 14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- 15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Dalam pelaksanaan tugas tentunya dibutuhkan dukungan personel yang memadai baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas sehingga kegiatan dapat berjalan dan mencapai hasil yang optimal. Pada tahun 2020, jumlah personel yang terdapat pada Seksi SDM, sebanyak 14 orang yang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 1 orang kepala seksi dan 12 orang staf. Distribusi personel Bidang SDM Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Distribusi Personel Pengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Pendidikan	Jumlah	Status Kepegawaian
1	S-2	4	3 PNS, 1 PTT
2	S-1	5	4 PNS, 1 TKHL
3	D-III	2	TKHL
4	SLTA	3	TKHL
TOTAL		14	

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa personel SDM yang mempunyai pendidikan SLTA sebanyak 3 orang, berharap agar personel tersebut dapat meningkatkan pendidikan dan pengetahuan sehingga dapat melaksanakan tugas yang dibebankan.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan yang berkaitan dengan SDM pada tahun 2020 antara lain:

- a. Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDM di Daerah.
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM di Provinsi.

- c. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PPSDMK.
- d. Pengangkatan Tenaga Medis Non PNS Provinsi Kepulauan Riau.
- e. Pengangkatan Tenaga Paramedis Non PNS Provinsi Kepulauan Riau.
- f. Dukungan penyelenggaraan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
- g. Dukungan Insentif Tenaga Dokter Internsip.
- h. Program Pemenuhan SDMK melalui Program Nusantara Sehat baik Individual maupun Tim Based,
- i. Program Pemenuhan SDMK melalui Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).
- j. Pengelolaan peserta Tugas belajar dan Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PPDGS).
- k. Program percepatan pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- l. Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.
- m. Penyusunan Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan.
- n. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kegiatan SDMK.

Adapun pembiayaan dari program dan kegiatan PPSDMK ini bersumber dari APBN Dana Dekonsentrasi Satker 12 dan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2020.

BAB 3

DESKRIPSI PERENCANAAN SDM KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tenaga Kesehatan merupakan komponen esensial penggerak sistem kesehatan di Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan ketersediaan, distribusi, kompetensi, dan kinerja tenaga kesehatan menjadi salah satu isu kunci yang terus diupayakan peningkatannya melalui berbagai macam program. Tenaga kesehatan menjadi penting karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian konsep dan implementasi akan secara langsung menyebabkan gangguan pada keseluruhan proses sistem kesehatan. Bahkan pada Tahun 2020 ini muncul slogan “SDM Unggul Indonesia Maju”.

Sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Upaya pelayanan kesehatan dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh, berjenjang, terpadu dan berkesinambungan. Selain itu, upaya kesehatan juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi dan informasi bidang kesehatan seiring dengan fenomena globalisasi berdasarkan paradigma sehat.

Perencanaan SDM Kesehatan sebagai salah satu unsur dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, merupakan suatu proses sistematis dalam upaya menetapkan jumlah, jenis dan kualifikasi SDM yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi suatu wilayah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Dalam menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan baik

dalam jumlah, jenis maupun kompetensinya secara merata. Sehubungan hal tersebut diperlukan perencanaan SDM Kesehatan yang dapat mengantisipasi kebutuhan lokal, nasional dan global yang dilakukan secara berjenjang berdasarkan ketersediaan tenaga kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Di era desentralisasi bidang kesehatan, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk merekrut SDM di daerah masing-masing. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan kebutuhan SDM. Perencanaan SDM Kesehatan di Kepulauan Riau diharapkan mampu untuk mendukung PISPK, SPM Bidang Kesehatan, SDG's, RPJMD Kepulauan Riau, kebutuhan organisasi dan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan dinyatakan bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan diperlukan data, informasi dan indikator kesehatan yang dikelola dalam Sistem Informasi Kesehatan. Saat ini instrumen pengumpulan data SDM Kesehatan berbasis web (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) yang disingkat SISDMK, sehingga proses pengisian atau *entry* data SDM lebih mudah dengan tersedianya instrumen pengisian *online* tersebut.

3.1 Rekapitulasi SDM Provinsi Kepulauan Riau

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat, berbagai upaya kesehatan dilaksanakan Pemerintah bersama-sama dengan swasta dan masyarakat. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Pada Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dijelaskan bahwa sub sistem sumber daya manusia kesehatan merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung

guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. SDM Kesehatan dikelompokkan menjadi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Adapun tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ketrampilan melalui pendidikan formal di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, 12 rumpun dan jenis tenaga kesehatan sebagai berikut :

1. Tenaga medis: dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis.
2. Tenaga psikologi klinis: psikologis klinis.
3. Tenaga perawat: berbagai jenis perawat (perawat, ners, perawat medikal bedah, dll).
4. Tenaga kebidanan: bidan
5. Tenaga kefarmasian: apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
6. Tenaga kesehatan masyarakat: epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
7. Tenaga kesehatan lingkungan: sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan dan mikrobiolog kesehatan.
8. Tenaga gizi: nutrisionis dan dietisen.
9. Tenaga keterampilan fisik: fisioterapis, okupasi terapis, terapi wicara dan akupuntur.
10. Tenaga keteknisan medis: perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien / optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut serta audiologis.

11. Tenaga teknik biomedika: radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis dan ortotik prostetik.
12. Tenaga kesehatan tradisional: tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.

Dalam menata SDM kesehatan, sangat dibutuhkan data SDM kesehatan yang valid, akurat, lengkap dan terbaru. Pengambilan keputusan dalam pengadaan, pendayagunaan, pendistribusian dan pengembangan SDM kesehatan dapat dilakukan secara tepat apabila didasarkan pada data-data (*evidence based*). Dalam upaya penyediaan data yang valid, lengkap dan terbaru, Kementerian Kesehatan melalui Badan PPSDM telah merancang Sistem Informasi SDM Kesehatan. Pengisian data dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelola dalam input data dan mempersamakan persepsi, maka telah dilaksanakan pertemuan pengelola data baik di tingkat Provinsi dan Pusat. Berikut ini akan dijabarkan data SDM kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau sesuai data yang telah diinput pengelola dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan.

1. Rekapitulasi Data SDM Kesehatan di Kabupaten / Kota se-Kepulauan Riau

Tabel 3.1 Rekapitulasi Data SDM Kesehatan Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau Tahun 2020

NO	JENIS SDM KESEHATAN	Kota Tg.Pinang	Kota Batam	Kab. Bintan	Kab. Karimun	Kab. Lingga	Kab. Natuna	Kab. Kep. Anambas
1.	Dokter Umum	160	317	92	77	35	53	34
2.	Dokter Gigi	34	68	23	16	13	9	7
3.	Dokter Spesialis	90	243	21	34	5	8	6
4.	Dokter Gigi Spesialis	12	9	2	1	0	0	1
5.	Psikologi Klinis	4	2	1	1	0	0	0
6.	Keperawatan	717	1625	407	476	289	238	239
7.	Kebidanan	233	649	277	303	211	174	146
8.	Kefarmasian	89	232	37	40	34	44	17
9.	Kesehatan Masyarakat	28	53	37	48	34	43	27
10.	Kesehatan Lingkungan	30	63	38	29	39	27	20

11.	Gizi	20	52	20	26	12	26	20
12.	Keterampilan Fisik	17	32	7	4	2	6	6
13.	Keteknisian Medis	37	106	31	23	6	15	13
14.	Teknik Biomedika	67	218	35	28	18	18	20
15.	Asisten Tenaga Kesehatan	112	225	62	37	49	191	12
17.	Nakes Lainnya	7	44	3	19	2	2	1
18.	Tenaga Penunjang Kesehatan	992	1475	420	547	247	345	300
JUMLAH		2.649	5.413	1.709	1.513	996	1.199	869
TOTAL		14.348 Orang						

Sumber : SI SDM, November 2020

Berdasarkan tabel 3.1 di atas yang di *update* pada website SISDMK bulan November 2020 dapat dilihat bahwa perbandingan jumlah SDM kesehatan terbanyak berada di Kota Batam sebanyak 5.413 orang. Jumlah SDM di Kota Batam tersebut menunjukkan perbandingan yang setara antara jumlah SDM dengan jumlah fasyankes (RSUD, RSU Swasta, Puskesmas, fasyankes lainnya), serta jumlah penduduk dimana yang paling tinggi juga berada di wilayah Kota Batam. Semakin banyak jumlah penduduk yang harus dilayani dalam bidang kesehatan maka kebutuhan akan berdirinya fasyankes dengan jumlah yang banyak akan semakin tinggi. Selanjutnya dengan semakin banyak fasyankes maka kebutuhan akan jumlah dan jenis SDM juga akan semakin banyak. Oleh karena itu, wajar jika SDM Kesehatan pada Wilayah Kota Batam memiliki jumlah SDM yang terbanyak.

2. Rekapitulasi Fasyankes yang Tercakup Pada Pemetaan SDM Kesehatan di Fasyankes

Tabel 3.2 Tipe Fasyankes yang Tercakup pada Pemetaan SDM Kesehatan Tahun 2020

NO	TIPE FASYANKES	Σ FASYANKES DALAM SI SDM
1	Dinas Kesehatan	8
2	Puskesmas	91
3	Rumah Sakit	34

4	BBPK, Bapelkes/Bapelkesnas	0
5	Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)	3
6	Balai Pengobatan / Kesehatan Masyarakat	6
7	Apotik	0
8	Toko Obat Tradisional	0
9	Rumah Bersalin	0
10	Instalasi / Gudang Farmasi	10
11	Praktek Dokter / Dokter Gigi / Bidan Mandiri	0
12	Optik	0
13	Klinik Pengobatan Tradisional (Batra)	0
14	Klinik	61
15	Poliklinik / Praktek Bersama	0
16	Laboratorium Kesehatan	8
17	Fasyankes Lainnya	0
TOTAL		221

Sumber: SI SDM, November 2020

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa rekapan data fasilitas pelayanan kesehatan yang disajikan pada dokumen deskripsi ini baru mencakup data dari 221 fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau baik milik Pemerintah maupun Swasta. Jika diperhatikan, data fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah di *entry* masih belum lengkap. Jumlah puskesmas saat ini berjumlah 91 dan sudah semua puskesmas di *entry* di SI SDM, begitupun dengan rumah sakit di Provinsi Kepulauan Riau yang berjumlah 34 rumah sakit. Melihat gambaran data pada tabel di atas, masih banyak fasyankes yang belum diinput data SDM nya ke dalam SI SDM. Hal ini merupakan tantangan untuk pengelola SI SDM baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melengkapi data tersebut.

3. Rekapitulasi SDM Kesehatan di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM)

Tabel 3.3 Rekapitulasi SDM Kesehatan di Fasyankes Berdasarkan Fungsi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

NO	RUMPUN SDM	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Medis	579	759	1.338
2	Psikologi Klinis	1	7	8
3	Keperawatan	1.013	2.985	3.998
4	Kebidanan	0	1.996	1.996
5	Kefarmasian	99	392	491
6	Kesehatan Masyarakat	96	174	270
7	Kesehatan Lingkungan	84	167	251
8	Gizi	17	159	176
9	Keterampilan Fisik	24	50	74
10	Keteknisian Medis	76	159	235
11	Teknik Biomedika	149	254	403
12	Kesehatan Tradisional	-	-	-
13	Asisten Tenaga Kesehatan	146	534	680
14	Tenaga Penunjang	2.093	2.217	4.310
	TOTAL	4.374	9.852	14.226

Sumber : SI SDM, November 2020

Berdasarkan tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah SDM kesehatan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan fungsinya sebanyak 14.226 orang yang tersebar pada 221 fasilitas pelayanan kesehatan. Jumlah SDM kesehatan terbanyak yaitu tenaga penunjang yaitu sebanyak 4.310 orang, kemudian tenaga keperawatan yaitu sebanyak 3.998 orang, dan disusul tenaga dengan fungsi sebagai tenaga kebidanan sebanyak 1.996 orang. SDM dengan fungsi sebagai tenaga kesehatan tradisional tercatat belum ada tersedia di Provinsi Kepulauan Riau, padahal saat ini Program Kesehatan Tradisional sedang digalakkan Kementerian Kesehatan, dan pada Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat Seksi Kesehatan Tradisional.

4. Rekapitulasi SDM di Fasyankes Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi)

Tabel 3.4 Rekapitulasi SDM Kesehatan Di Fasyankes Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi) Tahun 2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SD	61	37	98
2	SMP / Setara	109	68	177
3	SMA / Setara	1.109	928	2.037
4	D-1	24	35	59
5	D-2	-	-	-
6	D-3	1.259	5.486	6.745
7	D-4	33	299	332
8	S-1	1.028	1.909	2.937
9	Sp-1	330	183	513
10	Sp-2	10	-	10
11	Profesi	209	600	809
12	S-2	134	120	254
13	S-3	12	20	32
TOTAL		4.318	9.685	14.003

Sumber : SI SDM, November 2020

Pemetaan SDM Kesehatan selain berdasarkan jenis SDM Kesehatan juga berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan. Hal ini untuk melihat apakah suatu jabatan sudah berdasarkan kompetensi yang dimiliki yang berhubungan dengan pendidikan formal yang dimiliki seseorang tersebut. Dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis tidak bisa dilakukan oleh jenis tenaga kesehatan lain.

Berdasarkan tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan SDM Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 yang terbanyak pada jenjang pendidikan D3 yaitu sebanyak 6.745 orang, disusul dengan jumlah SDM pada jenjang pendidikan S1 sebanyak 2.937. Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa SDM kesehatan dengan pendidikan di bawah SMA/Setara juga masih relatif banyak yaitu 2.037 orang.

5. Rekapitulasi Tenaga Medis di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM)

Tenaga medis mencakup dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Berdasarkan tabel 3.5 berikut, dapat dilihat bahwa jumlah tenaga medis di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.338 orang, dengan jumlah terbanyak adalah dokter umum sebanyak 763 orang. Jumlah tersebut dapat dikatakan belum menggambarkan jumlah sesungguhnya karena jumlah tenaga medis yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta belum seluruhnya tercakup dalam data ini.

Tabel 3.5 Rekapitulasi Tenaga Medis di Fasyankes Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Fungsi (Kode SDM) Tahun 2020

NO	TENAGA MEDIS	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Dokter	270	493	763
2	Dokter Gigi	41	124	165
3	Dokter Spesialis & Sub Spesialis	252	134	381
4	Dokter Gigi Spesialis	15	9	24
TOTAL		578	760	1.338

Sumber : SI SDM, November 2020

6. Rekapitulasi Tenaga Medis Spesialis di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM)

Pelayanan kesehatan spesialis merupakan salah satu pelayanan yang sangat dibutuhkan masyarakat, dengan semakin kompleksnya penyakit yang ditemui di masyarakat. Pada SI SDM, fungsi tenaga medis spesialis dibagi menjadi 9 jenis dokter spesialis. Dari data yang dientri pada SI SDM diketahui bahwa jumlah 232 dokter spesialis yang meliputi antara lain dokter spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis kandungan, spesialis radiologi, spesialis anastesiologi, spesialis patologi klinik, spesialis patologi anatomi dan spesialis rehabilitasi medis. Data

dokter spesialis yang bekerja di fasyankes swasta belum seluruhnya tercakup dalam data ini. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Rekapitulasi Tenaga Medis Spesialis Di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM) Tahun 2020

NO	TENAGA MEDIS SPESIALIS	JENIS KELAMIN		Σ
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD)	28	9	37
2	Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi - Kebidanan & Kandungan (Sp.OG)	35	14	49
3	Dokter Spesialis Anak (Sp.A)	21	19	40
4	Dokter Spesialis Bedah (Sp.B)	32	3	35
5	Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad)	7	11	18
6	Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An)	22	4	26
7	Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK)	5	12	17
8	Dokter Spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA)	2	7	9
9	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik (Sp.RM)	1	-	1
TOTAL		153	79	232

Sumber : SI SDM, November 2020

7. Rekapitulasi Tenaga Keperawatan di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM) dan Pendidikan (Kode Prodi)

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan keperawatan yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh perawat yang memiliki kompetensi, kewenangan, etik, dan moral tinggi. Sebagaimana diatur dalam UU No. 36 tahun 2014 bahwa pelayanan keperawatan dibagi menjadi 7 jenis fungsi yaitu perawat kesehatan masyarakat, perawat kesehatan anak, perawat maternitas, perawat medikal bedah, perawat geriatri, dan perawat kesehatan jiwa. Perawat memiliki kewenangan untuk melakukan asuhan keperawatan secara mandiri dan komprehensif serta tindakan kolaborasi keperawatan dengan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kualifikasinya.

Jumlah tenaga kesehatan dengan fungsi sebagai perawat yang terekam dalam SI SDM adalah sebanyak 3.998 orang, dengan komposisi 2.985 perempuan dan 1.013 laki-laki. Dari tujuh jenis fungsi perawat yang

ada, yang belum tersedia di Provinsi Kepulauan Riau adalah perawat geriatri. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Rekapitulasi Tenaga Keperawatan di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM) Tahun 2020

NO	TENAGA KEPERAWATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Perawat Kesehatan Masyarakat	975	2.885	3.860
2	Perawat Kesehatan Anak	3	15	18
3	Perawat Maternitas	-	3	3
4	Perawat Medikal Bedah	24	38	62
5	Perawat Geriatri	-	-	-
6	Perawat Kesehatan Jiwa	11	44	55
7	Perawat Komunitas	-	-	-
TOTAL		1.013	2.985	3.998

Sumber : SI SDM, November 2020

Sementara jika diperhatikan berdasarkan pembagian jenjang pendidikan tenaga perawat terbanyak dengan jenjang pendidikan D3 yaitu sebanyak 2.159 orang, kemudian disusul dengan pendidikan sarjana keperawatan yaitu sebanyak 353 orang. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Rekapitulasi Tenaga Keperawatan di Fasyankes Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi) Tahun 2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN TENAGA KEPERAWATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	D-3	500	1.659	2.159
2	D-4	4	11	15
3	S-1	103	250	353
4	S-2	0	2	2
5	Profesi	51	152	203
6	SMA	9	36	45
TOTAL		667	2.110	2.777

Sumber : SI SDM, November 2020

8. Rekapitulasi Tenaga Farmasi di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM) dan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi)

Tenaga Farmasi terdiri dari tenaga Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian terdiri dari Sarjana dan Magister Farmasi (Non Apoteker), Ahli Madya Farmasi (Asister Apoteker) dan Analis Farmasi. Dalam SI SDM, tercatat bahwa jumlah tenaga farmasi yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 adalah sebanyak 491 orang dengan rincian 99 laki-laki dan 392 perempuan. Dan secara jenjang pendidikan, tenaga farmasi terbanyak adalah dengan pendidikan D3 sebanyak 132 orang. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.9 dan tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.9 Rekapitulasi Tenaga Farmasi di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM) Tahun 2020

NO	TENAGA FARMASI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Apoteker	59	212	271
2	Tenaga Teknis Kefarmasian	40	180	220
TOTAL		99	392	491

Sumber : SI SDM, November 2020

Tabel 3.10 Rekapitulasi Tenaga Kefarmasian di Fasyankes Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi) Tahun 2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN TENAGA KEFARMASIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	D-3	32	100	132
2	D-4	-	-	-
3	S-1	19	72	91
4	S-2	-	-	-
5	Profesi	18	54	72
TOTAL		69	226	295

Sumber : SI SDM, November 2020

9. Rekapitulasi Tenaga Kesling dan Gizi di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM) dan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi)

Jenis tenaga kesehatan lingkungan terdiri dari tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan. Sementara itu, yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi terdiri atas nutrisionis dan dietisien. Dari data SI SDM, tercatat bahwa jumlah tenaga kesehatan lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 sebanyak 427 orang, dengan jumlah terbanyak tenaga sanitasi lingkungan sebanyak 238 orang. Tenaga entomolog kesehatan sebanyak 13 orang. Sementara itu, untuk tenaga gizi tercatat sebanyak 176 orang, yang terbagi menjadi tenaga nutrisionis sebanyak 173 orang dan tenaga dietisien sebanyak 3 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan, tenaga kesehatan lingkungan yang terbanyak dengan pendidikan D3 sebanyak 148 orang. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.11 dan 3.12 berikut.

Tabel 3.11 Rekapitulasi Tenaga Kesling dan Gizi di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM) Tahun 2020

NO	TENAGA KESLING	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sanitasi Lingkungan	74	164	238
2	Entomolog Kesehatan	10	3	13
3	Mikrobiolog Kesehatan	-	-	-
4	Nutrisionis	16	157	173
5	Dietisien	1	2	3
TOTAL		101	326	427

Sumber : SI SDM, November 2020

Tabel 3.12 Rekapitulasi Tenaga Kesling di Fasyankes Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi) Tahun 2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN TENAGA KESLING	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	D-3	43	105	148
2	D-4	1	0	1
3	S-1	21	79	50
4	S-2	2	1	3
TOTAL		67	135	202

Sumber : SI SDM, November 2020

10. Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Masyarakat di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM) dan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi)

Jenis tenaga yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat antara lain terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.

Tabel 3.13 Rekapitulasi Tenaga Kesmas Di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM) Tahun 2020

NO	TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Kesehatan Masyarakat (Lainnya)	48	102	150
2	Epidemiolog Kesehatan	22	30	52
3	Promosi Kesehatan	7	16	23
4	Kesehatan Kerja	8	5	13
5	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	9	15	24
6	Biostatistik dan Kependudukan	1	1	2
7	Reproduksi dan Keluarga	-	5	5
8	Informatika Kesehatan	1	-	1
TOTAL		96	174	270

Sumber : SI SDM, November 2020

Berdasarkan tabel 3.13 diatas, terdapat 270 tenaga kesehatan masyarakat yg tersebar di seluruh fasyankes di Provinsi Kepulauan Riau. Tenaga kesmas terbanyak dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 182 orang. Data dapat dilihat pada tabel 3.14.

Tabel 3.14 Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Masyarakat di Fasyankes Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi) Tahun 2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN TENAGA KESMAS	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	D-3	6	9	15
2	D-4	1	2	3
3	S-1	64	118	182
4	S-2	4	6	10
TOTAL		75	135	210

Sumber : SI SDM, November 2020

11. Rekapitulasi Tenaga Keterampilan Fisik di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM) dan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi)

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur. Dari 4 jenis tenaga keterampilan fisik yang tercatat tersedia di Provinsi Kepulauan Riau adalah fisioterafis sebanyak 74 orang, dengan jenjang pendidikan terbanyak adalah D3 sebanyak 22 orang. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.15 dan 3.16 berikut.

Tabel 3.15 Rekapitulasi Tenaga Keterampilan Fisik di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM) Tahun 2020

NO	TENAGA FARMASI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Fisioterapis	19	48	67
2	Okupasi Terapis	3	1	4
3	Terapis Wicara	2	1	3
4	Akupunktur	-	-	-
TOTAL		24	50	74

Sumber : SI SDM, November 2020

Tabel 3.16 Rekapitulasi Tenaga Keterampilan Fisik di Fasyankes Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi) Tahun 2020

JENJANG PENDIDIKAN TENAGA KETERAPIAN FISIK	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
D-3	6	16	22
D-4	2	4	6
S-1	1	2	3
TOTAL	9	22	31

Sumber : SI SDM, November 2020

12. Rekapitulasi Tenaga Keteknisian Medis di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM) dan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi)

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan

audiologis. Jumlah tenaga keteknisian medis di provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 tercatat sebanyak 235 orang, dengan jumlah terbanyak adalah tenaga perekam medis dan informasi kesehatan yaitu 125 orang. Jenjang pendidikan terbanyak adalah D3 sebanyak 104 orang. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.17 dan tabel 3.18 berikut.

Tabel 3.17 Rekapitulasi Tenaga Keteknisian Medis di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM) Tahun 2020

NO	TENAGA KETEKNISIAN MEDIS	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	38	87	125
2	Teknisi Kardiovaskular	-	-	-
3	Teknisi Pelayanan Darah	7	5	12
4	Refraksionis Optisien/Optomtris	3	3	6
5	Teknisi Gigi	5	9	14
6	Penata Anestesi	11	8	19
7	Terapis Gigi dan Mulut	11	47	59
8	Audiologis	1	-	1
TOTAL		76	159	235

Sumber : SI SDM, November 2020

Tabel 3.18 Rekapitulasi Tenaga Keteknisian Medis di Fasyankes Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi) Tahun 2020

JENJANG PENDIDIKAN TENAGA KETEKNISIAN MEDIS	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
D-3	19	85	104
D-4	-	2	2
S-1	1	6	7
TOTAL	20	93	113

Sumber : SI SDM, November 2020

13. Rekapitulasi Tenaga Teknik Biomedika di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM) dan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi)

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.

Jumlah tenaga teknik biomedika di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 adalah sebanyak 406 orang. Dari 6 jenis teknik biomedika, yang paling banyak adalah ahli teknologi laboratorium medik yaitu sebanyak 238 orang. Dan jenjang pendidikan terbanyak adalah D3 sebanyak 347 orang.

Tabel 3.19 Rekapitulasi Tenaga Teknik Biomedika di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM) Tahun 2020

NO	TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Radiografer	65	67	132
2	Elektromedis	23	7	30
3	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	58	180	238
4	Fisikawan Medik	1	1	2
5	Ortotik Prostetik	3	-	3
TOTAL		151	255	406

Sumber : SI SDM, November 2020

Tabel 3.20 Rekapitulasi Tenaga Teknik Biomedika di Fasyankes Berdasarkan Jenjang Pendidikan (kode prodi) Tahun 2020

JENJANG PENDIDIKAN TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
D-3	128	219	347
D-4	11	10	21
S-1	5	11	16
TOTAL	144	240	374

Sumber : SI SDM, November 2020

14. Rekapitulasi Asisten Tenaga Kesehatan di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM) dan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi)

Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga. Dari data SI SDM, jumlah asisten tenaga kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sebanyak 689 orang. Jumlah asisten tenaga kesehatan terbanyak adalah tenaga keperawatan (218 orang). Para asisten tenaga kesehatan yang saat ini bekerja di pelayanan kesehatan

masih diberi kesempatan untuk tetap melayani sampai dengan bulan Oktober tahun 2020. Agar para asisten tenaga kesehatan ini dapat terus melaksanakan praktek, maka diwajibkan kepada mereka untuk meningkatkan pendidikannya. Tahun 2017-2020, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program Percepatan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk tenaga kesehatan yang berstatus sebagai ASN dengan pembiayaan uang kuliah dari Kemenkes. Untuk Provinsi Kepulauan Riau, program pendidikan RPL yang sudah diselenggarakan antara lain jurusan keperawatan, gizi, farmasi, bidan, keperawatan gigi, transfusi darah, dan ATLM. Sementara itu, untuk tenaga kesehatan yang Non ASN, seyogyanya akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini, namun dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan penyelenggaraan program menjadi tertunda. Rincian data Asisten Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada tabel 3.21 berikut.

Tabel 3.21 Rekapitulasi Asisten Tenaga Kesehatan di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM) Tahun 2020

NO	ASISTEN NAKES	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Keperawatan	59	159	218
2	Kebidanan	0	145	145
3	Kefarmasian	45	103	148
4	Teknik Biomedika	17	69	86
5	Kesehatan Lingkungan	15	13	28
6	Gizi	6	39	45
7	Keteknisian Medis	4	15	19
TOTAL		146	543	689

Sumber : SI SDM, November 2020

Tabel 3.22 Rekapitulasi Tenaga Asisten Nakes di Fasyankes Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi) Tahun 2020

JENJANG PENDIDIKAN TENAGA ASISTEN NAKES	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
SMA / Setara	30	80	110
D-1	4	5	9
TOTAL	34	85	119

Sumber : SI SDM, November 2020

15. Rekapitulasi Tenaga Penunjang Kesehatan di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM) dan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi)

Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) disebutkan bahwa yang termasuk SDM kesehatan meliputi tenaga kesehatan profesi, tenaga kesehatan nonprofesi, dan tenaga penunjang kesehatan. Meskipun keberadaan tenaga penunjang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan kesehatan, namun keberadaannya sangat penting karena berkaitan dengan manajemen pelayanan kesehatan. Jumlah tenaga penunjang kesehatan yang tercatat dalam SI SDM sebanyak 4.319 orang yang tersebar di dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, dll. Secara pendidikan dapat dilihat bahwa sebagian besar tenaga penunjang kesehatan memiliki jenjang pendidikan SMA/ sederajat (1.745 orang), dan dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 1.044 orang. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.23 dan tabel 3.24.

Tabel 3.23 Rekapitulasi Tenaga Penunjang Kesehatan di Fasyankes Berdasarkan Fungsi (Kode SDM) Tahun 2020

TENAGA PENUNJANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Struktural	253	253	506
Dukungan Manajemen	1.835	1.956	3.791
Pendidikan dan Pelatihan	10	12	22
TOTAL	2.098	2.221	4.319

Sumber : SI SDM, November 2020

Tabel 3.24 Rekapitulasi Tenaga Penunjang di Fasyankes Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Kode Prodi) Tahun 2020

JENJANG PENDIDIKAN TENAGA PENUNJANG KESEHATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
SD	60	34	94
SMP / Setara	106	66	172
SMA / Setara	1.005	740	1.745
D-1	14	13	27
D-2	-	1	1
D-3	166	403	569
D-4	6	51	57
S-1	429	615	1.044
Profesi	15	55	70

JENJANG PENDIDIKAN TENAGA PENUNJANG KESEHATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
S-2	83	75	158
S-3	5	8	13
TOTAL	1.889	2.061	3.950

Sumber : SI SDM, November 2020

3.2 Puskesmas

Puskesmas merupakan jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, puskesmas dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan segala upaya, faktor-faktor pendukung pelayanan kesehatan 4 antara lain peningkatan kualitas dan pelayanan, kompetensi petugas dan peningkatan sarana prasarana. Di Era JKN pelaksanaan pelayanan kesehatan dimulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai *gatekeeper* yang berfungsi sebagai penapis rujukan serta kendali mutu dan kendali biaya dalam pelaksanaan jaminan kesehatan.

1) Jumlah Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau

Sampai dengan tahun 2020, tercatat sebanyak 91 (sembilan puluh satu) Puskesmas di SI SDM Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dengan rincian 48 (empat puluh delapan) puskesmas rawat inap dan 43 (empat puluh tiga) puskesmas non rawat inap. Berikut ini adalah distribusi Puskesmas menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau :

Tabel 3.25 Daftar Puskesmas se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Puskesmas	Kemampuan Penyelenggara	Kriteria
Kota Tanjungpinang			
1	Puskesmas Tanjungpinang	Rawat Inap	Perkotaan
2	Puskesmas Sei Jang	Non Rawat Inap	Perkotaan
3	Puskesmas Melayu Kota Piring	Non Rawat Inap	Perkotaan
4	Puskesmas Tanjung Unggat	Non Rawat Inap	Perkotaan
5	Puskesmas Mekar Baru	Non Rawat Inap	Perkotaan
6	Puskesmas Batu 10	Non Rawat Inap	Perkotaan
7	Puskesmas Kampung Bugis	Rawat Inap	Perkotaan
Kota Batam			
1	Puskesmas Batu Aji	Rawat Inap	Perkotaan
2	Puskesmas Tanjung Sengkuang	Rawat Inap	Perkotaan

No	Puskesmas	Kemampuan Penyelenggara	Kriteria
3	Puskesmas Belakang Padang	Rawat Inap	Perkotaan
4	Puskesmas Sei Panas	Rawat Inap	Perkotaan
5	Puskesmas Tg. Buntung Bengkong	Rawat Inap	Perkotaan
6	Puskesmas Bulang	Rawat Inap	Perkotaan
7	Puskesmas Galang	Rawat Inap	Perkotaan
8	Puskesmas Baloi Permai	Rawat Inap	Perkotaan
9	Puskesmas Lubuk Baja	Rawat Inap	Perkotaan
10	Puskesmas Kabil	Rawat Inap	Perkotaan
11	Puskesmas Sambau	Rawat Inap	Perkotaan
12	Puskesmas Sei Lekop	Rawat Inap	Perkotaan
13	Puskesmas Sei Pancur	Rawat Inap	Perkotaan
14	Puskesmas Sekupang	Rawat Inap	Perkotaan
15	Puskesmas Botania	Rawat Inap	Perkotaan
16	Puskesmas Tiban Baru	Rawat Inap	Perkotaan
17	Puskesmas Sei Langkai	Rawat Inap	Perkotaan
18	Puskesmas Rempang Cate	Rawat Inap	Perkotaan
19	Puskesmas Kampung Jabi	Rawat Inap	Perkotaan
20	Puskesmas Tanjung Uncang	Non Rawat Inap	Perkotaan
21	Puskesmas Mentarau	Non Rawat Inap	Perkotaan
Kabupaten Bintan			
1	Puskesmas Teluk Bintan	Non Rawat Inap	Pedesaan
2	Puskesmas Tanjung Uban	Rawat Inap	Perkotaan
3	Puskesmas Teluk Sebong	Non Rawat Inap	Pedesaan
4	Puskesmas Sri Bintan	Non Rawat Inap	Pedesaan
5	Puskesmas Berakit	Non Rawat Inap	Pedesaan
6	Puskesmas Teluk Sasah	Non Rawat Inap	Pedesaan
7	Puskesmas Kuala Sempang	Non Rawat Inap	Pedesaan
8	Puskesmas Kijang	Rawat Inap	Perkotaan
9	Puskesmas Sei Lekop	Non Rawat Inap	Pedesaan
10	Puskesmas Kawal	Rawat Inap	Perkotaan
11	Puskesmas Mantang	Rawat Inap	Terpencil
12	Puskesmas Kelong	Rawat Inap	Terpencil
13	Puskesmas Numbing	Non Rawat Inap	Terpencil
14	Puskesmas Toapaya	Non Rawat Inap	Pedesaan
15	Puskesmas Tambelan	Rawat Inap	Sangat Terpencil
Kabupaten Karimun			
1	Puskesmas Moro	Rawat Inap	Pedesaan
2	Puskesmas Durai	Rawat Inap	Pedesaan
3	Puskesmas Tanjung Batu	Rawat Inap	Perkotaan
4	Puskesmas Tanjung Berlian	Non Rawat Inap	Pedesaan
5	Puskesmas Kundur Barat	Non Rawat Inap	Pedesaan
6	Puskesmas Tanjung Balai	Rawat Inap	Perkotaan
7	Puskesmas Buru	Non Rawat Inap	Pedesaan
8	Puskesmas Meral	Non Rawat Inap	Perkotaan
9	Puskesmas Tebing	Non Rawat Inap	Perkotaan
10	Puskesmas Niur Permai	Non Rawat Inap	Terpencil
11	Puskesmas Belat	Non Rawat Inap	Pedesaan
12	Puskesmas Meral Barat	Non Rawat Inap	Pedesaan
13	Puskesmas Ungar	Non Rawat Inap	Pedesaan
Kabupaten Natuna			
1	Puskesmas Midai	Rawat Inap	Sangat Terpencil

No	Puskesmas	Kemampuan Penyelenggara	Kriteria
2	Puskesmas Batubi Jaya	Non Rawat Inap	Pedesaan
3	Puskesmas Pulau Laut	Rawat Inap	Sangat Terpencil
4	Puskesmas Pulau Tiga	Rawat Inap	Terpencil
5	Puskesmas Bunguran Tengah	Non Rawat Inap	Pedesaan
6	Puskesmas Bunguran Selatan	Non Rawat Inap	Pedesaan
7	Puskesmas Sedanau	Rawat Inap	Terpencil
8	Puskesmas Ranai	Rawat Inap	Perkotaan
9	Puskesmas Tanjung	Non Rawat Inap	Pedesaan
10	Puskesmas Kelarik	Rawat Inap	Terpencil
11	Puskesmas Subi	Rawat Inap	Sangat Terpencil
12	Puskesmas Serasan	Rawat Inap	Sangat Terpencil
13	Puskesmas Serasan Timur	Rawat Inap	Sangat Terpencil
14	Puskesmas Pulau Tiga Barat	Rawat Inap	Terpencil
Kabupaten Lingga			
1	Puskesmas Raya	Non Rawat Inap	Pedesaan
2	Puskesmas Dabo Lama	Non Rawat Inap	Perkotaan
3	Puskesmas Daik	Non Rawat Inap	Perkotaan
4	Puskesmas Pancur	Non Rawat Inap	Terpencil
5	Puskesmas Senayang	Rawat Inap	Sangat Terpencil
6	Puskesmas Tajur Biru	Non Rawat Inap	Sangat Terpencil
7	Puskesmas Penuba	Non Rawat Inap	Pedesaan
8	Puskesmas Sungai Pinang	Non Rawat Inap	Terpencil
9	Puskesmas Lanjut	Non Rawat Inap	Pedesaan
10	Puskesmas Resang	Non Rawat Inap	Terpencil
11	Puskesmas Posek	Non Rawat Inap	Sangat Terpencil
12	Puskesmas Benan	Non Rawat Inap	Sangat Terpencil
13	Puskesmas Rejai	Non Rawat Inap	Sangat Terpencil
Kabupaten Kep.Anambas			
1	Puskesmas Letung	Rawat Inap	Sangat Terpencil
2	Puskesmas Jemaja Timur	Rawat Inap	Sangat Terpencil
3	Puskesmas Siantan Selatan	Non Rawat Inap	Sangat Terpencil
4	Puskesmas Terempa	Rawat Inap	Terpencil
5	Puskesmas Siantan Timur	Rawat Inap	Sangat Terpencil
6	Puskesmas Siantan Tengah	Rawat Inap	Terpencil
7	Puskesmas Palmatak	Rawat Inap	Terpencil
8	Puskesmas Jemaja Barat	Non Rawat Inap	-
Total Keseluruhan 91 Puskesmas			

Sumber : SI SDMK, November 2020

2) Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan

Sembilan jenis tenaga kesehatan yang dijadikan indikator dalam pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas adalah dokter, dokter gigi, bidan, perawat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan ahli teknologi laboratorium kesehatan. Di Puskesmas, ketersediaan 9 (sembilan) jenis tenaga

kesehatan tersebut minimal 1 (satu) orang untuk setiap jenis tenaga kesehatan tersebut. Hal ini dengan pertimbangan sulitnya memperoleh tenaga promotif preventif ditempatkan di puskesmas. Meskipun awal pendirian puskesmas, kriteria SDM Kesehatan di puskesmas wajib dipenuhi tetapi kenyataan di lapangan masih ada puskesmas yang mengalami kekurangan SDM Kesehatan termasuk 9 tenaga kesehatan strategis. Gambaran Puskesmas dengan Sembilan jenis tenaga kesehatan strategis dapat dilihat pada tabel 3.26 berikut:

Tabel 3.26 Puskesmas yang Memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan Strategis di Kabupate/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

NO	KABUPATEN	NAMA PUSKESMAS YG MEMENUHI 9 NAKES STRATEGIS	JUMLAH PUSKESMAS
1	KARIMUN	1. Pkm Tanjungbatu 2. Pkm Tebing 3. Pkm Tanjung Berlian 4. Pkm Kundur Barat 5. Pkm Belat	13
2	BATAM	1. Pkm Tg.Sengkuang 2. Pkm Sekupang 3. Pkm Sei Langkai 4. Pkm Lubuk Baja 5. Pkm Sei Pancur 6. Pkm Sambau 7. Pkm Botania 8. Pkm Kabil 9. Pkm Kampung Jabi 10. Pkm Pkm Baloi Permai	21
3	NATUNA	1. Pkm Pulau Tiga 2. Pkm Bunguran Tengah 3. Pkm Ranai 4. Pkm Tanjung	14
4	ANAMBAS	1. Pkm Jemaja Timur 2. Pkm Siantan Tengah 3. Pkm Terempa 4. Pkm Letung	8
5	TG.PINANG	1. Pkm Sei Jang 2. Pkm Tanjung Unggat 3. Pkm Mekar Baru 4. Pkm Batu 10 5. Pkm Melayu Kota Piring	7
6	LINGGA	1. Pkm Posek 2. Pkm Raya 3. Pkm Resang 4. Pkm Dabo Lama 5. Pkm Daik	13

NO	KABUPATEN	NAMA PUSKESMAS YG MEMENUHI 9 NAKES STRATEGIS	JUMLAH PUSKESMAS
7	BINTAN	1. Pkm Kijang 2. Pkm Toapaya 3. Pkm Sri Bintan 4. Pkm Tg.Uban 5. Pkm Teluk Sebong 6. Pkm Kawal 7. Pkm Teluk Sasah 8. Pkm Kuala Sempang 9. Pkm Kelong 10. Pkm Teluk Bintan	15
JUMLAH		43	91

Sumber : SI SDMK, November 2020

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dari 91 puskesmas yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, baru sebanyak 43 (48%) puskesmas yang memenuhi sembilan jenis tenaga kesehatan strategis. Belum tercapainya target dalam pemenuhan tenaga kesehatan strategis di Puskesmas disebabkan oleh adanya moratorium CPNS dan adanya pegawai yang pensiun atau pindah. Adanya penerimaan CPNS pada tahun 2019 (pengumuman tahun 2020), diharapkan kekurangan tenaga kesehatan strategis tersebut dapat dipenuhi. Kekurangan tenaga kesehatan strategis ini tidak saja untuk puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil, namun juga pada Puskesmas Perkotaan dan Pedesaan. Dengan diterbitkannya Permenkes No. 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam mendukung Program Nusantara Sehat, harapan akan pemenuhan tenaga kesehatan strategis di puskesmas kiranya dapat terwujud. Dimana dalam Permenkes tersebut tidak menetapkan kriteria puskesmas tertentu sebagai wilayah penempatan tenaga Nusantara Sehat. Dengan kata lain, tenaga Nusantara Sehat berarti dapat ditempatkan di puskesmas perkotaan dan pedesaan juga, bahkan di rumah sakit sesuai dengan kebutuhan dari fasilitas pelayanan kesehatan.

3.3 Rumah Sakit

Dalam UU RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pelayanan rumah sakit merupakan salah satu bentuk upaya yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Pelayanan rumah sakit berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan rumah sakit dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta.

Sesuai peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit dan amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 40 ayat 1 mewajibkan rumah sakit untuk melakukan akreditasi RS dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan secara berkala setiap 3 tahun. Akreditasi wajib bagi semua rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta/BUMN/TNI. Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi.

Pada tahun 2019, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki minimal 1 RS terakreditasi sehingga pencapaian indikator sebesar 100% jauh melampaui target yang hanya 42,8%. Dalam pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 terdapat 33 Rumah Sakit yang telah terakreditasi terdiri dari 17 rumah sakit pemerintah, 16 rumah sakit swasta dan 4 rumah sakit yang belum terakreditasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.27 Jumlah Rumah Sakit Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

NO	KAB/KOTA	PEMERINTAH PUSAT / TN/BUMN	PEMDA	SWASTA	RS TERAKREDITASI	RS BELUM AKREDITASI
1	Karimun	1	1	0	2	0
2	Bintan	0	2	0	2	0
3	Natuna	1	1	0	1	1
4	Lingga	0	2	0	2	0
5	Anambas	0	3	0	1	2
6	Batam	2	1	17	17	3
7	Tanjungpinang	1	2	0	3	0
	TOTAL	5	12	17	28	6

Sumber : SI SDM, November 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penyebaran rumah sakit yang terbanyak adalah terdapat di Kota Batam. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk yang jumlahnya juga terbanyak di Kota Batam.

Jumlah RSUD Kabupaten/ Kota kelas C milik pemerintah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 5 rumah sakit. Rumah sakit pemda kelas C antara lain RSUD M. Sani, RSUD Tanjungpinang, RSUD Bintan, RSUD Engku Haji Daud, dan RSUD Natuna. Sementara RS tipe D di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 5 rumah sakit antara lain RSUD Encik Maryam, RSUD Dabo Singkep, dan RSUD Matak, RSUD Tarempa dan RSUD Jemaja. Dari 10 RS Pemda tersebut, dapat dilihat bahwa 4 spesialis dasar pada umumnya sudah terpenuhi, kecuali Rumah Sakit di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sementara untuk dokter spesialis penunjang belum terpenuhi pada 10 rumah sakit tersebut. Pada tabel 3.28 dapat dilihat kecukupan dari masing-masing jenis dokter spesialis.

Tabel 3.28 Ketersediaan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Tipe C dan D di Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama RS	Spesialis Anak	Spesialis Obgyn	Spesialis Bedah	Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Anastesi	Spesialis Radiologi	Spesialis Patologi Klink
1	RSUD Tanjungpinang	v	v	v	v	v	v	v
2	RSUD Bintan	v	v	-	v	v	v	v

3	RSUD Engku H.Daud	v	v	v	v	v	v	v
4	RSUD M. Sani	v	v	v	v	v	v	v
5	RSUD Dabo	v	v	-	v	-	-	-
6	RSUD Encik Maryam	v	-	-	-	-	-	-
7	RSUD Natuna	-	v	v	v	-	v	-
8	RSUD Matak	-	-	-	-	-	-	-
9	RSUD Jemaja	-	-	v	-	-	-	-
10	RSUD Tarempa	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: SI SDM, November 2020

3.4 Fasilitas Kesehatan Lainnya

Berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional, Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan perorangan dan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, yang diselenggarakan Pemerintah (termasuk TNI/POLRI), pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dan/atau masyarakat yang sifatnya sesuai kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat. Tabel 3.29 menunjukkan jumlah SDM di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya (klinik swasta/perorangan) yang sudah terdata di SI-SDM.

Tabel 3.29 Jumlah SDM di Fasilitas Kesehatan Lainnya di Provinsi Kepulauan Riau yang Terdata di SI SDM

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah SDM
1	Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan (Poltekkes Kemkes Tanjungpinang)	18
2	Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)	
	- Tanjungpinang	54
	- Batam	92
	- Tanjungbalai Karimun	54
3	Sarana Kefarmasian dan Alkes	
	- Tanjungpinang	8
	- Batam	15
	- Bintan	5
	- Tg. Balai Karimun	8
	- Lingga	11
	- Natuna	10
	- Kep. Anambas	11
4	Klinik	
	- Tanjungpinang (37 klinik)	296
	- Bintan (3 klinik)	40
	- Tg. Balai Karimun (3 klinik)	133
	- Natuna (4 klinik)	21

5	Laboratorium Kesehatan	74
6	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit	69
Total		863

Sumber: SI SDMK, November 2020

Adapun data SDMK pada tabel di atas dapat dikatakan belum mencakup seluruh fasilitas kesehatan lainnya. Akan diupayakan untuk perluasan pendataan pada tahun berikutnya.

BAB 4 DESKRIPSI PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan kesehatan dan pelayanan kesehatan di Kepulauan Riau maka pemerintah perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan yang ada. Peningkatan kuantitas SDM kesehatan dapat dilaksanakan melalui pengadaan CPNS, atau pengangkatan tenaga tidak tetap (Non PNS). Pengadaan tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat melalui pendidikan dan atau pelatihan (pasal 25). Penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengadakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Pengadaan tenaga kesehatan perlu dilakukan dengan memperhatikan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, jumlah sarana pelayanan kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.

1. Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Non PNS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Tabel 4.1 Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Non PNS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	DOKTER	DOKTER GIGI	BIDAN
1	Tanjungpinang	24	7	41
2	Batam	7	1	40
3	Karimun	0	-	20
4	Bintan	8	0	29
5	Natuna	5	-	19
6	Lingga	-	1	8
PROVINSI		44	9	157

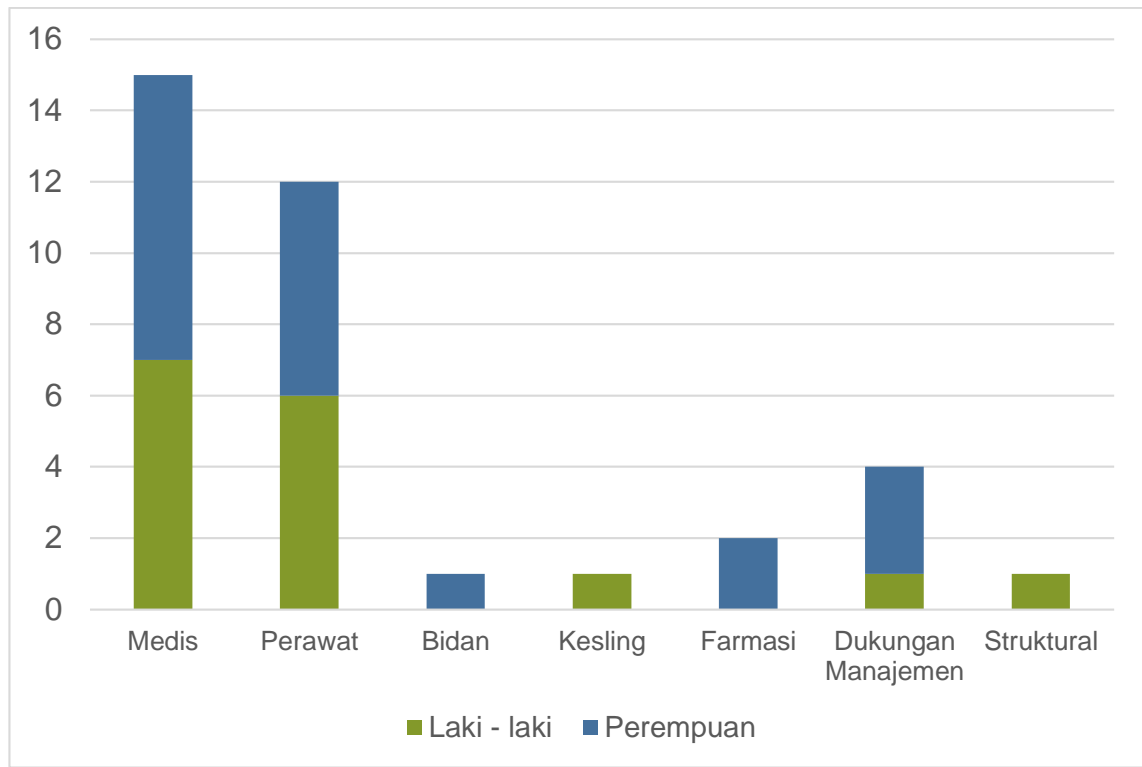
Sumber : Seksi SDM, 2020

Untuk menjaga agar pelayanan kesehatan dapat tetap berjalan secara optimal yang didukung oleh ketersediaan tenaga kesehatan khususnya dokter, dokter gigi dan bidan, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan terobosan dengan pengangkatan tenaga medis (dokter dan dokter gigi) dan tenaga paramedis (bidan) dengan status non PNS. Program ini telah berjalan sejak tahun 2011 dengan sumber pembiayaan dari APBD Provinsi Kepulauan Riau. Tenaga medis dan paramedis non PNS di Provinsi Kepulauan Riau ini berkewajiban membina dan mengunjungi masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk *home visit*. Hingga tahun 2020, jumlah tenaga medis non PNS sebanyak 53 orang dan tenaga paramedis berjumlah 157 orang (Tabel 4.1).

2. Rekapitulasi SDM Kesehatan yang Melanjutkan Pendidikan Berdasarkan Jenis Dikjut dan Jenjang Pendidikan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Riau juga menyelenggarakan pendidikan yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan ini dilaksanakan dengan pembiayaan oleh Pemerintah Pusat, Daerah maupun pihak lain. Jenis pendidikan yang berkelanjutan yaitu Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS), Program Tugas Belajar Pusat, Program Tugas Belajar Daerah, dan Izin Belajar. Para peserta tugas belajar yang telah selesai pendidikan memiliki kewajiban untuk mengabdikan di fasilitas kesehatan yang memberikan rekomendasi dengan lama pengabdian minimal selama $2n$ atau $2n+1$ tahun (n = lamanya pendidikan yang ditempuh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan program pendidikan berkelanjutan, saat ini keberadaan dokter spesialis yang sangat dibutuhkan masyarakat, dapat dikatakan semakin terpenuhi di Kepulauan Riau. Data rekapitulasi SDM kesehatan yang mengikuti pendidikan berkelanjutan pada tahun 2020 dapat dilihat grafik berikut.

Gambar 4.1 Rekapitulasi SDM Kesehatan yang Melanjutkan Pendidikan Berdasarkan Jenis Dikjut dan Jenjang Pendidikan Tahun 2020



Sumber: SI SDM, November 2020

3. Rekapitulasi SDM Kesehatan yang Mengikuti Diklat Berdasarkan Rumpun Diklat

Upaya lainnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan adalah melalui program pendidikan dan pelatihan. Secara umum pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka, baik yang meliputi teknis bidang pekerjaannya, manajerial ataupun kepemimpinan. Semuanya ini dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi.

Tabel 4.2 Rekapitulasi SDM Kesehatan yang Mengikuti Diklat Berdasarkan Rumpun Diklat di Provinsi Kepulauan Riau Sampai Dengan Tahun 2020

JENIS DIKLAT	JUMLAH
Prajabatan	629
Fungsional Kesehatan	280
Teknis Profesi Kesehatan	947
Teknis Program/Upaya Kesehatan	290
Fungsional Non Kesehatan (Umum)	51
Teknis Umum/Administrasi & Manajemen	17
Manajemen Kesehatan	60
Penjenjangan	13
Pratugas	2
Tanpa Keterangan	50
TOTAL	2.043

Sumber: SI SDM, November 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam SI SDM, jumlah tenaga kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang telah mengikuti diklat sebanyak 2.043 orang. Jenis Diklat yang paling banyak diikuti adalah jenis diklat teknis profesi kesehatan yaitu sebanyak 947 orang. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tenaga fungsional non kesehatan seperti bendaharawan atau arsiparis juga dibutuhkan di suatu institusi dan tentunya membutuhkan diklat yang akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemangku tugas tersebut.

BAB 5

DESKRIPSI PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

Pendayagunaan tenaga kesehatan adalah upaya pemerataan dan pemanfaatan serta pengembangan tenaga kesehatan. Pendayagunaan tenaga kesehatan, utamanya dalam rangka pemerataan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan tenaga kesehatan, baik untuk memenuhi kebutuhan pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Pemerataan tenaga kesehatan juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan sebagai administrator kesehatan, regulator, pendidik, peneliti, dan tenaga pemberdayaan masyarakat.

Pendayagunaan tenaga kesehatan mencakup pendayagunaan tenaga kesehatan di dalam negeri dan di luar negeri. Dalam rangka Upaya Pendayagunaan SDM Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan upaya penempatan tenaga kesehatan yang ditujukan untuk mencapai pemerataan yang berkeadilan dalam pembangunan kesehatan.

Dalam rangka penempatan tenaga kesehatan untuk kepentingan pelayanan publik dan pemerataan, pemerintah melakukan berbagai pengaturan untuk memberikan imbalan material atau non material kepada tenaga kesehatan untuk bekerja di bidang tugas atau daerah yang tidak diminati, seperti daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, pulau-pulau terluar dan terdepan, serta daerah bencana dan rawan konflik.

Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dan Swasta melakukan rekrutmen dan penempatan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan dan atau menjalankan tugas dan fungsi institusinya. Pemerintah Daerah bersama UPT-nya dan masyarakat melakukan rekrutmen dan penempatan tenaga penunjang yang diperlukan untuk mendukung UKBM sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan strategi penguatan kuantitas tenaga kesehatan melalui program pengangkatan dokter/dokter gigi, Non PNS, dan bidan Non PNS Provinsi Kepulauan Riau, yang pendayagunaannya di Puskesmas, Pustu, Polindes dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah. Dukungan pendayagunaan tenaga kesehatan juga diperkuat dengan adanya program Penugasan Khusus Nusantara Sehat (NS) serta Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) yang pengadaan dan pembiayaan oleh Kementerian Kesehatan RI. Rekapitulasi jumlah akan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

1. Program Penugasan Khusus Melalui Nusantara Sehat

a. Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Periode VI (29 Oktober 2018 – 29 Oktober 2020)

Tabel 5.1 Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2019

NO	JENIS TENAGA	UNIT KERJA PUSKESMAS	JUMLAH
1	Bidan	Pkm. Subi	1
2	Perawat	Pkm. Kelong	1
TOTAL			2

Sumber: Seksi SDM, 2020

Tabel 5.4 diatas adalah data rekapitulasi upaya pemenuhan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual pada periode VI (29 Oktober 2018 – 29 Oktober 2020) di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2 orang untuk penempatan di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Bintan.

b. Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Periode VIII (01 Desember 2018 – 30 November 2020)

Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual pada periode VIII (01 Desember 2018 – 30 November 2020) di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2 orang perawat untuk penempatan Puskesmas Tambelan Kabupaten Bintan.

c. Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Periode I Tahun 2019 (01 Februari 2019 – 31 Januari 2021)

Tabel 5.2 Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2020

NO	JENIS TENAGA	UNIT KERJA PUSKESMAS	JUMLAH
1	Dokter Umum	Pkm. Serasan	1
		Pkm. Tambelan	1
TOTAL			2

Sumber: Seksi SDM, 2020

Tabel 5.2 diatas adalah data rekapitulasi upaya pemenuhan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual pada periode I Tahun 2019 (01 Februari 2019 – 31 Januari 2021) di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2 orang Dokter untuk penempatan di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Bintan.

d. Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Periode 1 April 2019 – 31 Maret 2021

Tabel 5.3 Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2020

NO	JENIS TENAGA	UNIT KERJA PUSKESMAS	JUMLAH
1	Perawat	Pkm. Kelong	4
		Pkm. Mantang	4
2	ATLM	Pkm. Kelong	1
3	Bidan	Pkm. Mantang	1
4	Dokter	Pkm. Mantang	1
5	Farmasi	Pkm. Kelarik	1
TOTAL			12

Sumber: Seksi SDM, 2020

Tabel 5.3 diatas adalah data rekapitulasi upaya pemenuhan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual pada periode 1 April 2019 – 31 Maret 2021 di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 12 orang untuk penempatan di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna.

e. Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Periode III (1 Mei 2019 – 30 April 2021)

Tabel 5.4 Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2020

NO	JENIS TENAGA	UNIT KERJA PUSKESMAS	JUMLAH
1	Farmasi	Pkm. Letung	1
2	Dokter	Pkm. Pulau Tiga	1
3	Gizi	Pkm. Siantan Tengah	1
		Pkm. Pulau Tiga	1
		Pkm. Mantang	1
		Pkm. Kelong	1
TOTAL			6

Sumber: Seksi SDM, 2020

Tabel 5.4 diatas adalah data rekapitulasi upaya pemenuhan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual pada periode III (1 Mei 2019 – 30 April 2021) di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 6 orang untuk penempatan di Kabupaten Bintan, Kabupaten Kep. Anambas dan Kabupaten Natuna.

f. Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Periode V Tahun 2019 (01 Juli 2019 – 30 Juni 2021)

Tabel 5.5 Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2020

NO	JENIS TENAGA	UNIT KERJA PUSKESMAS	JUMLAH
1	Dokter	Pkm. Pulau Tiga	1
TOTAL			1

Sumber: Seksi SDM, 2020

Tabel 5.5 di atas adalah data rekapitulasi upaya pemenuhan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual pada periode V Tahun 2019 (01 Juli 2019 – 30 Juni 2021) di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 1 orang untuk penempatan di Kabupaten Natuna.

g. Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Periode VIII (01 Oktober 2019 – 30 September 2021)

Tabel 5.6 Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2020

NO	JENIS TENAGA	UNIT KERJA PUSKESMAS	JUMLAH
1	Perawat	Pkm. Sei Lekop Batam	1
2	Kesmas	Pkm. Tg. Sengkuang	1
3	Gizi	Pkm. Tiban Baru	1
4	Farmasi	Pkm. Raya	1
TOTAL			4

Sumber: Seksi SDM, 2020

Tabel 5.6 di atas adalah data rekapitulasi upaya pemenuhan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual pada periode VIII (01 Oktober 2019 – 30 September 2021) di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 4 orang untuk penempatan di Kota Batam dan Kabupaten Lingga.

h. Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Periode IX (01 November 2019 – 31 Oktober 2021)

Tabel 5.7 Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2020

NO	JENIS TENAGA	UNIT KERJA PUSKESMAS	JUMLAH
1	Gizi	Pkm. Raya	1
2		Pkm. Kundur Barat	1
3		Pkm. Tg. Berlian	1
4	Kesmas	Pkm. Sekupang	1
5	ATLM	Pkm. Kundur Barat	1
		Pkm. Sei Panas	1
TOTAL			6

Sumber: Seksi SDM, 2020

Tabel 5.7 di atas adalah data rekapitulasi upaya pemenuhan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual pada periode IX (01 November 2019 – 31 Oktober 2021) di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 6 orang

untuk penempatan di Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga.

i. Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Periode X (21 November 2019 – 20 November 2021)

Tabel 5.8 Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2020

NO	JENIS TENAGA	UNIT KERJA PUSKESMAS	JUMLAH
1	Kesling	Pkm. Kundur Barat	1
		Pkm. Tg. Berlian	1
2	Kesmas	Pkm. Tg. Sengkuang	1
		Pkm. Daik	1
		Pkm. Raya	1
		Pkm. Sei Pancur	1
3	Gizi	Pkm. Buru	1
TOTAL			7

Sumber: Seksi SDM, 2020

Tabel 5.8 di atas adalah data rekapitulasi upaya pemenuhan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual pada periode X (21 November 2019 – 20 November 2021) di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 7 orang untuk penempatan di Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga.

j. Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Periode I (31 Januari 2020 – 30 Januari 2022)

Tabel 5.9 Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2020

NO	JENIS TENAGA	UNIT KERJA PUSKESMAS	JUMLAH
1	Dokter Gigi	Pkm. Pulau Tiga	1
2	ATLM	Pkm. Raya	1
		Pkm. Kijang	1
		Pkm. Teluk Sasah	1
3	Farmasi	Pkm. Kawal	1
		Pkm. Kuala Sempang	1
4	Kesling	Pkm. Sri Bintan	1
5	Kesmas	Pkm. Kawal	1
		Pkm. Kijang	1

6	Gizi	Pkm. Teluk Bintan	1
		Pkm. Teluk Sasah	1
		Pkm. Toapaya	1
		Pkm. Teluk Bintan	1
TOTAL			13

Sumber: Seksi SDM, 2020

Tabel 5.9 di atas adalah data rekapitulasi upaya pemenuhan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual pada periode Periode I (31 Januari 2020 – 30 Januari 2022) di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 13 orang untuk penempatan Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga.

k. Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Periode IV (01 Agustus 2020 – 31 Juli 2022)

Tabel 5.10 Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2020

NO	JENIS TENAGA	UNIT KERJA PUSKESMAS	JUMLAH
1	Gizi	Pkm. Siantan Timur	1
		Pkm. Sedanau	1
		Pkm. Serasan Timur	1
		Pkm. Kuala Sempang	1
		Pkm. Pancur Lingga	1
2	Dokter	Pkm. Pancur Lingga	1
3	Bidan	Pkm. Siantan Timur	1
		Pkm. Pulau Tiga	1
4	ATLM	Pkm. Midai	1
5	Perawat	Pkm. Pulau Tiga	1
6	Kesling	Pkm. Kuala Sempang	1
7	Kesmas	Pkm. Mantang	1
		Pkm. Sri Bintan	1
TOTAL			13

Sumber: Seksi SDM, 2020

Tabel 5.10 di atas adalah data rekapitulasi upaya pemenuhan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual pada periode IV (01 Agustus 2020 – 31 Juli 2022) di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 13 orang

untuk penempatan di Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kep. Anambas.

I. Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Periode V (01 Oktober 2020 – 30 September 2022)

Tabel 5.11 Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Tahun 2020

NO	JENIS TENAGA	UNIT KERJA PUSKESMAS	JUMLAH
1	Dokter	Pkm. Siantan Tengan	1
		Pkm. Pulau Laut	1
		Pkm. Tambelan	1
2	Bidan	Pkm. Pulau Laut	1
		Pkm. Jemaja Timur	1
		Pkm. Subi	1
3	Kesling	Pkm. Subi	1
4	Perawat	Pkm. Pulau Laut	1
5	Farmasi	Pkm. Sedanau	1
		Pkm. Tambelan	1
		Pkm. Tajur Biru	1
6	Gizi	Pkm. Tambelan	1
7	Kesmas	Pkm. Kelarik	1
		Pkm. Tambelan	1
		Pkm. Posek	1
TOTAL			15

Sumber: Seksi SDM, 2020

Tabel 5.11 di atas adalah data rekapitulasi upaya pemenuhan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual pada periode V (01 Oktober 2020 – 30 September 2022) di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 15 orang untuk penempatan di Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kep. Anambas.

2. Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Dalam rangka peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, pemerintah

melakukan upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Provinsi di Indonesia. Sebelumnya, program pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di atur dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis. Beberapa pasal Perpres nomor 4 tahun 2017 tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 62P/HUM/2018 Perpres tersebut di ganti dengan Perpres nomor 39 tahun 2020 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS). Pemenuhan tenaga dokter PGDS di Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2020 sebanyak 4 orang dokter spesialis (Tabel 5.12).

Tabel 5.12 Rekapitulasi PGDS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Kab/Kota	RS	Jenis Spesialis	Jumlah
1	Bintan	RSUD Bintan	Sp. Penyakit Dalam	1
			Sp. Obgyn	1
2	Kep.Anambas	RSUD Palmatak	Sp. Obgyn	1
TOTAL				3

Sumber: Seksi SDM, 2020

BAB 6

DESKRIPSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MUTU SDM KESEHATAN

Salah satu komponen penting dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah pengembangan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan mutu sebagai bagian dari pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Pembinaan tenaga kesehatan adalah upaya untuk mengarahkan, memberikan dukungan, serta mengawasi pengembangan tenaga kesehatan. Pembinaan tenaga kesehatan dimulai dari institusi yang menggunakan/mendayagunakan tenaga kesehatan baik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta, institusi pendidikan dan pelatihan, instansi pemerintah, pusat/lembaga penelitian, dan tenaga kesehatan sebagai individu (9). Tujuan utama pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan adalah untuk meningkatkan kualitas SDM Kesehatan sesuai kompetensi yang diharapkan dalam mendukung kebutuhan pembangunan kesehatan. Hal tersebut juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pelaku pembangunan kesehatan dan konsumen pelayanan kesehatan.

Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan berupa pembinaan dan pengawasan mutu terhadap standardisasi profesi, sertifikasi dan perizinan tenaga kesehatan, yang dilakukan bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya misalnya Organisasi Profesi Kesehatan dan pemerintah daerah. Sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014, dalam rangka meningkatkan mutu praktik serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat, Pemerintah membentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), yang mana tugas ini sebelumnya diemban oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) yang dibantu oleh Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP). Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia terdiri atas Konsil

masing-masing tenaga kesehatan. Saat ini proses pembentukan KTKI sedang dipersiapkan oleh Sekretariat KTKI, dan dalam masa transisi ini keberadaan MTKI dan MTKP masih tetap difungsikan, antara lain memverifikasi berkas usulan yang sudah masuk ke MTKP dalam STR Online versi 1 dan versi manual serta legalisir STR sampai dengan terbentuknya KTKI. Setelah KTKI terbentuk, maka peran dan fungsi MTKP perlu dibahas kembali termasuk tugas pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan dengan melibatkan Konsil masing-masing tenaga kesehatan dan organisasi profesi sesuai dengan kewenangannya.

Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan utamanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan sesuai kompetensi yang diharapkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan serta legislasi yang meliputi antara lain sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan (*licensing*), dan hak-hak tenaga kesehatan. Hak-hak tenaga kesehatan tersebut antara lain meliputi kesejahteraan dan kesempatan yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan karirnya (9).

Upaya Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan di berbagai tingkatan dan atau organisasi memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan tersebut. Pembinaan dan pengawasan praktik profesi bagi tenaga kesehatan profesi dilakukan melalui sertifikasi, registrasi, uji kompetensi dan pemberian lisensi bagi tenaga kesehatan yang memenuhi syarat.

Menindaklanjuti amanah Pasal 21 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, mahasiswa bidang kesehatan

pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Selain itu, uji kompetensi secara nasional diperlukan dalam upaya standardisasi dan penjaminan mutu lulusan pendidikan tinggi bidang kesehatan. Uji kompetensi dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Uji kompetensi untuk tenaga bidan dan perawat telah diberlakukan sejak Agustus 2013. Dan sejak November 2018 ini, uji kompetensi juga telah diwajibkan untuk lulusan elektromedik, terapi wicara, Teknik laboratorium medis, rekam medis, gizi, radiografi, terapis gigi dan mulut, okupasi terapi, refraksi optisi, teknik gigi, kesehatan lingkungan, dan akupuntur.

Lulusan tenaga kesehatan yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi, akan diberikan Surat Tanda Registrasi (STR) oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). Selanjutnya tenaga kesehatan yang telah memiliki STR, untuk perizinan/lisensi tenaga kesehatan profesi untuk melakukan praktik, setiap tenaga kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktek (SIP) diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi terkait.

Pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan dilakukan melalui sistem karier, penggajian, dan insentif untuk hidup layak sesuai dengan tata nilai di masyarakat dan beban tugasnya agar dapat bekerja secara profesional. Pengawasan SDM Kesehatan dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin melalui pengawasan melekat dan pengawasan profesi.

Dalam hal terjadi pelanggaran disiplin oleh tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang bekerja dalam bidang kesehatan dan menyebabkan kerugian pada pihak lain, maka sanksi administrasi maupun pidana harus dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat maupun tenaga yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Rekapitulasi SDM Kesehatan yang memiliki izin dan registrasi

Dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 disebutkan bahwa Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR (Surat Tanda Registrasi). Pada pasal 80-81 pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayan, melindungi penerima pelayan dan member kepastian hukum. Bila tenaga kesehatan tersebut menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Untuk memperoleh STR, tenaga kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah dan sertifikat kompetensi diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus ujian program pendidikan dan uji kompetensi.

Tabel 6.1 Rekapitulasi Jumlah Tenaga Kesehatan yang Memiliki Izin dan Registrasi Tenaga Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

JENIS PROFESI	AKTIF	STR	SIP
01. Medis	1658	1180	1060
02. Psikologi Klinis	8	3	3
03. Keperawatan	4052	2248	1428
04. Kebidanan	2029	1353	808
05. Kefarmasian	505	300	218
06. Kesehatan Masyarakat	273	85	6
07. Kesehatan Lingkungan	253	135	22
08. Gizi	180	102	44
09. Keterampilan Fisik	76	33	26
10. Keteknisan Medis	238	105	56
11. Tehnik Biomedika	406	265	171
12. Kesehatan Tradisional	0	0	0
13. Nakes Lainnya	78	36	21
TOTAL	9.756	5.845	3.863

Sumber: SI SDMK, November 2020

Berdasarkan data pada SI SDMK sebagaimana pada tabel diatas, jumlah tenaga kesehatan yang sudah memiliki STR di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 5.845 orang dari 9.756 tenaga kesehatan yang aktif. Bila dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan yang aktif, tentu jumlah tenaga yang memiliki izin dan registrasi ini sangat berbanding jauh, hal ini kemungkinan dikarenakan ada banyak STR yang sudah kadaluarsa.

Diharapkan tenaga kesehatan dapat segera mengurus STR maupun SIP 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku selesai. Setiap tenaga kesehatan hendaknya menyadari bahwa fungsi STR dan SIP merupakan aspek legal dan menjadi payung hukum perlindungan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas/praktek pelayanan kesehatan yang dilaksanakan. Untuk itu, diharapkan juga peran aktif dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memonitor keaktifan STR tenaga kesehatan di fasilitas yang dipimpinnya.

BAB 7 PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Pengembangan tenaga kesehatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu adalah merupakan suatu rangkaian yang bertujuan untuk mendukung suksesnya pembangunan kesehatan secara nasional. Tujuan pembangunan kesehatan dapat dicapai apabila didukung oleh tersedianya tenaga kesehatan yang memadai baik jumlah, jenis, maupun mutunya.

Deskripsi data Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) merupakan suatu gambaran pendayagunaan tenaga kesehatan yang dinarasikan sesuai dengan rekapitulasi data individu tenaga kesehatan khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, pada data yang tercakup dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terdapat sebanyak 14.348 tenaga kesehatan dengan macam jenis rumpun tenaga kesehatan termasuk asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang di distribusikan di berbagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yaitu 8 Dinas Kesehatan, 91 Puskesmas, 34 Rumah Sakit dan Fasyankes lainnya yang tercakup dalam Pemetaan Sistem Informasi SDMK baik milik pemerintah maupun swasta. Data tersebut adalah data terakhir periode November 2020 yang telah valid di Pemetaan Sistem Informasi SDMK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.

Deskripsi data SDMK dapat memberikan informasi mengenai gambaran organisasi dan program-program Sumber Daya Manusia Kesehatan, Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mencakup rekapitulasi tenaga kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau serta kebutuhan SDM Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau, Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau diuraikan tentang gambaran pengadaan SDM kesehatan yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya

manusia kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan serta dibahas tentang SDM Kesehatan yang melanjutkan pendidikan dan SDM Kesehatan yang mengikuti Diklat, Tugas Belajar dan PPDS/PPDGS.

Upaya pendayagunaan SDM Kesehatan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau termasuk diantaranya pendayagunaan pegawai tidak tetap (Non PNS) Dokter, Dokter Gigi dan Bidan, penugasan khusus Nusantara Sehat (NS) dan Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) serta Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDM Kesehatan di Wilayah Kerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.

7.2 Saran

Kedepannya, pemetaan SDM Kesehatan masih akan terus menyisir keberadaan tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Swasta dan Klinik – klinik swasta terutama di Kota Batam. Di Kota Batam terdapat 18 RS Swasta dan banyak klinik yang belum terdata tenaga kesehatannya. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan fasyankes swasta dan organisasi profesi yang ada di wilayah kerjanya sehingga didapatkan data keberadaan SDM Kesehatan yang lengkap.

Semua pengelola data SDM Kesehatan, baik dari fasyankes dalam maupun luar jajaran Dinas Kesehatan Provinsi, diharapkan memiliki komitmen untuk senantiasa melakukan pendataan, revisi, dan *updating* data SDM Kesehatan secara tepat waktu serta berkontribusi aktif untuk memberikan laporan dan menyampaikan kendala/pendapat/saran.

Dukungan penuh bagi para pemangku kebijakan dan pengelola SDM Kesehatan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat agar monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan data SDM Kesehatan dapat lebih intensif dilakukan sehingga dapat tersusun Dokumen Profil SDM Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau secara periodik.

BAB 8

DAFTAR REFERENSI

1. BPS Kepri. Statistik Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang; 2020.
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Jakarta; 2002.
3. Gubernur Kepulauan Riau. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tanjungpinang; 2017.
4. Perpres RI. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta; 2012.
5. UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Jakarta; 2014.
6. Kemkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta; 2014.
7. Dinkes Prov.Kepri. Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau; 2019.
8. Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis. Jakarta; 2020.
9. Menteri Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Jakarta; 2013.